

MANAJEMEN ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Romadlon¹, Sinta Devi Prastika Putri², Agus Tinus³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang

Email: romadhonriszki@gmail.com¹, sintadeviprastika@gmail.com², agt_tns@umm.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber seperti buku dan jurnal yang membahas ekonomi pendidikan, kebijakan anggaran, serta pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Dari hasil kajian diketahui bahwa pembiayaan pendidikan bukan sekadar pengeluaran, tetapi merupakan investasi penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja agar hasilnya lebih optimal. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, hingga dukungan dari masyarakat dan sektor swasta. Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dinilai mampu mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien karena didasarkan pada indikator kinerja yang jelas. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan yang berbasis kinerja serta pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kata kunci: Pembiayaan Pendidikan, Anggaran Pendidikan, Efisiensi, Akuntabilitas, *Performance-Based Budgeting*.

Abstract: This study aims to examine the management of education budgets and financing in an effort to improve efficiency and accountability in the national education system. The method used is library research, reviewing various sources, such as books and journals, that discuss educational economics, budget policy, and financial management in the education sector. The study reveals that education financing is not merely an expenditure, but a crucial investment in developing the quality of human resources. Therefore, it needs to be managed with a performance-based approach to optimize results. The education financing system in Indonesia involves various parties, from the central government through the State Budget (APBN), regional governments through the Regional Budget (APBD), to support from the community and the private sector. The implementation of performance-based budgeting is considered capable of encouraging more effective and efficient budget use because it is based on clear performance indicators. Furthermore, transparency and accountability are crucial for maintaining public trust in the management of education funds. Therefore, strengthening performance-based financial governance and utilizing digital systems for financial reporting

are crucial steps to improve the quality of national education.

Keywords: *Education Financing, Education Budget, Efficiency, Accountability, Performance-Based Budgeting.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, terutama dari sisi pendanaan. Dalam konteks pembangunan nasional, anggaran dan pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan strategis yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pembiayaan pendidikan sendiri berkaitan erat dengan konsep ekonomi pendidikan yang melihat pendidikan sebagai investasi modal manusia (*human capital*) yang memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai biaya pendidikan menjadi penting agar alokasi dana dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan anggaran yang dibuat pemerintah dengan kebutuhan nyata di lapangan, yang sering dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta kompleksitas dalam distribusi dana (Bastian, 2015).

Penelitian ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika pembiayaan pendidikan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Fokus kajian diarahkan pada beberapa hal utama, yaitu bagaimana konsep ekonomi pendidikan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran, serta bagaimana sistem pembiayaan yang melibatkan APBN, APBD, serta kontribusi masyarakat dan sektor swasta dapat saling mendukung. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan manajemen anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian penting, mengingat pengelolaan anggaran pendidikan sangat rentan terhadap ketidakefisienan apabila tidak dikelola dengan baik (Sudarman, 2021).

Secara teori, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemandirian pembiayaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kajian ini juga mencoba menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu terkait inovasi dalam pembiayaan pendidikan dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan (Lestari, 2022). Diharapkan,

hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merancang sistem anggaran yang lebih transparan, adil, dan inklusif. Dengan analisis yang dilakukan, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana cara mengelola sumber daya keuangan yang terbatas agar tetap mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas di semua jenjang pendidikan (Saputra, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan dan anggaran pendidikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, membandingkan, serta mensintesis berbagai konsep dan temuan penelitian terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika pembiayaan pendidikan, kebijakan anggaran, serta implementasi manajemen anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (Mulyasa, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian literatur, diperoleh beberapa temuan penting terkait manajemen anggaran dan pembiayaan pendidikan. Pertama, pembiayaan pendidikan merupakan investasi modal manusia yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara optimal. Kedua, struktur pembiayaan di Indonesia bersifat multistrata, melibatkan APBN, APBD, serta kontribusi masyarakat dan sektor swasta, meskipun masih terdapat ketimpangan antar daerah.

Ketiga, penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dinilai lebih efektif karena mengaitkan penggunaan dana dengan hasil yang terukur. Keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan pendidikan, sehingga penggunaan dana harus tepat sasaran. Kelima, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik, didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan.

Secara keseluruhan, penguatan manajemen anggaran berbasis kinerja yang transparan

dan akuntabel menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan

Pembahasan

1. Konsep Ekonomi Pendidikan dan Biaya Pendidikan

Konsep ekonomi pendidikan memandang pendidikan tidak hanya sebagai konsumsi, tetapi sebagai investasi modal manusia (*human capital*) yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (H. Asy'ari, 2021). Pendidikan memiliki nilai ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas individu yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan negara. Investasi di bidang pendidikan dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dalam pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi yang memberikan nilai tambah bagi kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Dalam memahami biaya pendidikan, perlu dibedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi pengeluaran seperti gaji guru, buku, serta operasional sekolah, sedangkan biaya tidak langsung berkaitan dengan biaya peluang, yaitu potensi pendapatan yang hilang karena seseorang memilih melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi beban ekonomi bagi individu dan masyarakat, sehingga perlu perencanaan yang tepat agar tidak menghambat akses pendidikan (Wahyudi, 2025).

Selain itu, terdapat perbedaan antara biaya privat yang ditanggung individu dan biaya sosial yang ditanggung pemerintah serta masyarakat. Keseimbangan antara keduanya menjadi penting dalam menentukan kebijakan subsidi pendidikan. Efektivitas pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan biaya satuan per siswa sesuai jenjang pendidikan (Sudarman, 2021). Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep ini, pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

2. Kebijakan Anggaran Pendidikan

Kebijakan anggaran pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan melalui pengelolaan sumber daya keuangan.

Kebijakan ini tidak hanya mengatur jumlah anggaran, tetapi juga mencakup sumber, distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di Indonesia, hal ini diperkuat secara konstitusional dengan kewajiban alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD. Dalam pandangan ekonomi pendidikan, kebijakan anggaran juga melibatkan berbagai pihak agar mampu menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara bersamaan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan anggaran pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama antara kebutuhan ideal dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok kurang mampu melalui bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, desentralisasi pendidikan diharapkan membuat pengelolaan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, meskipun masih berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas antarwilayah.

Saat ini, arah kebijakan anggaran pendidikan juga mulai difokuskan pada penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru untuk menjawab tuntutan dunia kerja. Keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Dengan kebijakan yang terarah dan evaluasi yang berkelanjutan, anggaran pendidikan diharapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh (Andini, R., & Rohman, 2022).

3. Struktur Pembiayaan Pendidikan

Struktur pembiayaan pendidikan di Indonesia bersifat multistrata, artinya pendanaan tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat dan sektor swasta. Dalam hal ini, APBN memiliki peran utama sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi amanat alokasi 20% anggaran pendidikan. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai mekanisme, termasuk belanja kementerian dan transfer ke daerah, serta digunakan untuk membiayai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan gaji pendidik guna menjamin layanan pendidikan dasar di seluruh wilayah (Hidayat, M., & Syarif, 2024).

Selain itu, APBD juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal, sehingga pembangunan pendidikan dapat lebih merata. Sinergi antara APBN dan APBD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan hingga ke daerah terpencil, meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan kemampuan fiskal antar daerah yang berpotensi

menimbulkan kesenjangan (Mulyono, 2010).

Di samping peran pemerintah, masyarakat dan sektor swasta juga turut berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan. Masyarakat berpartisipasi melalui biaya pendidikan atau dukungan komite sekolah, sementara sektor swasta memberikan bantuan melalui program CSR, beasiswa, dan pelatihan. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk menutupi kekurangan anggaran negara, sehingga sistem pembiayaan pendidikan menjadi lebih kuat, fleksibel, dan berkelanjutan (Fattah, 2017).

4. Manajemen Anggaran Pendidikan Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

Manajemen anggaran pendidikan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak lagi hanya berfokus pada jumlah dana, tetapi pada hasil yang dicapai. Berbeda dengan sistem tradisional yang cenderung menambah anggaran setiap tahun tanpa evaluasi mendalam, pendekatan ini menekankan keterkaitan antara dana yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat diukur melalui indikator kinerja, seperti peningkatan partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa (Sudarman, 2021).

Dalam penerapannya, sistem ini dimulai dari penetapan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam satu periode anggaran. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan dituntut lebih selektif dalam menyusun program kerja, dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada mutu pendidikan. Keberhasilan anggaran berbasis kinerja sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat serta komitmen pengelola dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara konsisten.

Namun, tantangan utama dalam penerapan sistem ini adalah menentukan indikator kinerja yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu mencerminkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya keterkaitan antara perencanaan anggaran dengan standar nasional pendidikan. Dengan sistem ini, pengelolaan anggaran menjadi lebih fleksibel, terarah, dan diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih profesional dan efektif.

5. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan

Efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan di sektor pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dalam konteks pendidikan, efisiensi dapat dibedakan menjadi efisiensi internal, yaitu pengelolaan dana untuk mengurangi angka putus sekolah dan kegagalan belajar, serta efisiensi eksternal yang berkaitan dengan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, efisiensi bukan berarti sekadar mengurangi biaya, tetapi lebih pada penggunaan anggaran secara tepat agar tidak terjadi pemborosan (Prasetyo, 2023).

Sementara itu, efektivitas berfokus pada sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai melalui penggunaan anggaran yang ada. Anggaran yang besar tidak selalu menjamin hasil yang baik jika tidak diarahkan pada sasaran yang tepat. Efektivitas dapat dilihat dari peningkatan kualitas siswa, kompetensi guru, serta tersedianya sarana pendukung pembelajaran. Dalam beberapa kasus, efektivitas memang memerlukan biaya awal yang cukup besar, tetapi memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang (Wahyudi, 2025).

Keterpaduan antara efisiensi dan efektivitas memerlukan pengawasan yang berkelanjutan serta evaluasi berbasis data. Tantangan yang sering dihadapi adalah inefisiensi birokrasi dan ketidakseimbangan alokasi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang transparan dan berbasis prioritas agar penggunaan anggaran benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, sumber, dan penggunaan anggaran kepada pihak terkait. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab dari pengelola pendidikan untuk melaporkan hasil penggunaan dana, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Tanpa adanya keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dapat menurun (Fauzi, 2023).

Dalam praktiknya, transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan laporan keuangan secara sederhana, tetapi perlu didukung oleh sistem informasi keuangan yang

terintegrasi dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* untuk mencegah penyimpangan. Akuntabilitas juga tidak hanya dilakukan kepada atasan (*vertikal*), tetapi juga kepada masyarakat dan orang tua siswa (*horizontal*), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara bersama. Namun, penerapan akuntabilitas masih menghadapi kendala, terutama terkait kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi Arkas menjadi penting untuk meningkatkan akurasi dan mempermudah proses pelaporan serta pengawasan secara *real-time*.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran. Jika diterapkan dengan baik, kedua prinsip ini dapat memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa anggaran dan pembiayaan pendidikan merupakan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan investasi modal manusia di Indonesia. Pengelolaan anggaran yang efektif berakar pada pemahaman konsep ekonomi pendidikan yang tepat, di mana setiap alokasi dana diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang. Struktur pembiayaan yang melibatkan sinergi antara APBN, APBD, serta kontribusi masyarakat dan sektor swasta terbukti menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan fiskal negara. Implementasi manajemen anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) menjadi kunci transformasi dalam memastikan bahwa setiap unit pendanaan berkontribusi langsung terhadap capaian standar nasional pendidikan yang terukur. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tercapai melalui skala prioritas yang ketat, sementara transparansi dan akuntabilitas menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian ini adalah pemerintah perlu memperkuat integrasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital di seluruh jenjang pendidikan untuk meminimalisir risiko inefisiensi. Selain itu, lembaga pendidikan harus meningkatkan kapasitas manajerial pengelola anggaran dalam menyusun perencanaan yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) daripada sekadar penyerapan anggaran. Masyarakat

dan sektor swasta perlu diberikan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui kebijakan insentif yang jelas agar kontribusi non-pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan anggaran harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa distribusi dana pendidikan tetap berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., & Rohman, A. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Pustaka Jurnal*.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Fattah, N. (2017). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A. (2023). *Performance Based Budgeting: Teori dan Implementasi pada Lembaga Pendidikan Negeri*. Kencana.
- H. Asy'ari. (2021). *Ekonomi Pendidikan: Investasi Human Capital dan Tantangan Global*. Bumi Aksara.
- Hidayat, M., & Syarif, L. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS melalui Digitalisasi Sistem Keuangan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*.
- Lestari, S. D. (2022). *Struktur Pembiayaan Pendidikan di Era Desentralisasi Fiskal*. Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Prasetyo, B. (2023). *Efisiensi dan Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Mencapai Standar Nasional Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Saputra, W. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Anggaran Pendidikan 20 Persen di Tingkat Daerah*. ALFABETA.
- Sudarman, D. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Wahyudi, T. (2025). *Akuntansi Sektor Publik untuk Satuan Pendidikan*. Andi Offset